

EVALUASI PENERAPAN SAK EP PADA KPRI “KARUNIA” SMPN 1 PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI

¹Retno Wulandari dan ²Choirul Hana

E-mail: retnodari1978@gmail.com, choirulhana@kahuripan.ac.id

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Kahuripan Kediri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan KPRI “KARUNIA” SMPN 1 Plosoklaten. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus koperasi, observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan, dokumentasi, serta studi literatur. Data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen pendukung juga dianalisis untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap SAK EP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah mulai menyusun laporan keuangan mengacu pada SAK EP, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti pencatatan manual, belum diterapkannya penyusutan aset tetap, klasifikasi arus kas yang belum sesuai standar, serta penggunaan istilah akuntansi yang belum konsisten. Kendala utama dalam penerapan SAK EP adalah kurangnya pemahaman pengurus terhadap standar akuntansi dan keterbatasan teknologi yang dimiliki. Meskipun demikian, koperasi menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan melalui peningkatan transparansi, rencana digitalisasi, dan pengembangan kapasitas SDM. Dengan evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan, KPRI “KARUNIA” berpeluang untuk mencapai penerapan SAK EP secara penuh di masa depan.

Kata Kunci: SAK EP, laporan keuangan, koperasi, akuntansi, digitalisasi sistem

Abstract

This study aims to analyze the application of the Private Entity Financial Accounting Standards (SAK EP) in the financial statements of KPRI "KARUNIA" SMPN 1 Plosoklaten. The method used was descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews with cooperative management, direct observation of the financial recording and reporting process, documentation, and literature review. Secondary data, in the form of financial reports and supporting documents, were also analyzed to evaluate the level of compliance with SAK EP. The results indicate that the cooperative has begun preparing financial reports in accordance with SAK EP, including the statement of financial position, income statement, and distribution of Operating Surplus (SHU). However, several shortcomings remain, such as manual recording, the lack of implementation of fixed asset depreciation, non-standard cash flow classification, and inconsistent use of accounting terminology. The main obstacles to implementing SAK EP are the management's lack of understanding of accounting standards and the limitations of its technology. Nevertheless, the cooperative has demonstrated a commitment to improving its reporting system through increased transparency, a digitalization plan, and human resource capacity development. With ongoing evaluation and development, KPRI "KARUNIA" has the potential to achieve full implementation of SAK EP in the future.

Keywords: SAK EP, financial reports, cooperatives, accounting, system digitalization

PENDAHULUAN

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berbasis pada asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Indonesia, koperasi memainkan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal dan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki prinsip-prinsip yang meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan secara demokratis, dan pembagian hasil Koperasi sebagai unit ekonomi dalam pembangunan dan pengembangan pergerakan ekonomi nasional Indonesia, dimana tugas pemerintah untuk menciptakan koperasi yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Salah satu indikator penerapan prinsip tersebut adalah penerapan akuntansi perkoperasian yang tertib dan sesuai dengan standar. (IAI,2020)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025, dengan penerapan dini sudah diperkenankan mulai 1 Januari 2022. Penyusunan SAK EP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan

entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas pengguna SAK EP tentu saja entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Namun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK EP apabila diperkenankan oleh otoritas berwenang. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Privat (SAK EP) pada koperasi tidak selalu berjalan mulus. Banyak koperasi menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi, keterbatasan pemahaman terhadap standar tersebut, dan minimnya penggunaan teknologi pendukung. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan anggota koperasi dan pihak eksternal terhadap laporan keuangan yang disajikan. (IAI,2020) usaha yang adil. (Subandi, 2017).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi, termasuk koperasi sekolah atau KPRI yang berada di lingkungan satuan pendidikan, belum sepenuhnya memahami dan menerapkan SAK EP dalam proses pelaporan keuangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi, tidak adanya pelatihan khusus bagi pengurus koperasi, serta anggapan bahwa pelaporan keuangan hanya formalitas untuk memenuhi kewajiban RAT. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan kondisi riil koperasi secara akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. (IAI,2020)

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di lingkungan instansi pendidikan, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) menjadi wadah ekonomi yang penting bagi guru dan staf sekolah. Salah satu contohnya adalah KPRI "KARUNIA" SMPN 1 PLOSOKLATEN, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, yang telah berdiri sejak tahun 1987. Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam, dengan jumlah anggota aktif sebanyak 69 orang yang terdiri dari guru, karyawan, serta keluarga besar mantan pegawai.

Sebagai koperasi yang berbadan hukum dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), KPRI "KARUNIA" SMPN 1 PLOSOKLATEN memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik tata kelola keuangan yang baik, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan observasi awal saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), diketahui bahwa laporan keuangan yang disusun masih menggunakan format sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Padahal, sejak 1 Januari 2022, koperasi sudah diarahkan untuk menerapkan SAK EP secara bertahap, dan rencana implementasi penuh akan dimulai pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius,

mengingat KPRI “KARUNIA” mengelola dana anggota dalam jumlah yang tidak sedikit, sudah berdiri cukup lama, mempunyai anggota cukup banyak dan sudah berbadan hukum maka Penerapan SAK EP penting dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan keuangan koperasi. Selain itu, ada tuntutan dan permohonan dari para anggota untuk menerapkan SAK EP agar kualitas laporan keuangan lebih baik

Meski demikian, penerapan standar akuntansi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pengurus koperasi masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman terhadap standar akuntansi, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, dan belum adanya sistem keuangan berbasis teknologi. Kondisi ini membuat pelaporan keuangan belum optimal sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan teori keagenan (agency theory) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), pemisahan antara pengurus (sebagai agen) dan anggota (sebagai prinsipal) menimbulkan risiko asimetri informasi. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan anggota dan memastikan pertanggungjawaban keuangan koperasi secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana KPRI "KARUNIA" telah menerapkan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian laporan keuangan yang telah sesuai dan belum sesuai dengan standar, mengungkap kendala dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan koperasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan penerapan SAK EP secara faktual dan sistematis, sedangkan pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam melalui wawancara dan observasi langsung kepada pengurus koperasi. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang mencakup laporan keuangan, pedoman akuntansi, dan dokumen terkait. Sumber data berasal dari pengurus, staf keuangan koperasi, serta dokumen resmi yang relevan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:124). Sampel dipilih berdasarkan kriteria subjek yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi, seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, observasi terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan, dokumentasi terhadap arsip dan laporan keuangan, serta studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan referensi resmi terkait SAK EP.

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, verifikasi dokumen, member check kepada informan, serta pencatatan data secara sistematis dan cermat. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel, pengkodean untuk mengelompokkan tema, penarikan kesimpulan, dan verifikasi temuan. Prosedur penelitian terdiri dari lima tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis, validasi data, dan penyusunan laporan, yang semuanya dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPRI "KARUNIA" SMPN 1 Plosoklaten didirikan pada 20 April 1999, berlandaskan Badan Hukum No. 112/BH/KDK.13.17/IV/1999, dan memiliki NPWP 02.068.314.0-655.000. Koperasi ini beranggotakan guru dan karyawan aktif, purna tugas, serta yang telah mutasi dari SMPN 1 Plosoklaten. Berlokasi di Jalan Raya Kawedusan, koperasi ini fokus pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui kegiatan utama simpan pinjam dan pembagian SHU. Jumlah anggota terus berkembang, dari 70 orang (2022–2023) menjadi 72 orang pada tahun 2024.

Struktur Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pengawas. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang memutuskan kebijakan strategis dan mengevaluasi kinerja. Pengurus bertanggung jawab atas operasional dan keuangan koperasi, dengan susunan: Ketua: Agus Puguh Santosa, S.Pd.I. Sekretaris: Sri Nurmawati, S.Kom. Bendahara: Siti Munti'ah, S.Pd. dan Sri Winarsih, S.Pd. Badan Pengawas memantau dan mengaudit aktivitas koperasi, terdiri dari: Ketua: Binti Khusmawati, S.Pd. Anggota: Anjik Yuswantoro, S.Pd. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Aktivitas utama koperasi adalah unit simpan pinjam yang memberikan layanan keuangan bagi anggota dengan bunga rendah dan proses mudah. Jenis simpanan yang tersedia meliputi: Simpanan Pokok: Wajib saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan Wajib: Iuran rutin bulanan.

Simpanan Sukarela: Tidak wajib, sesuai keinginan anggota. Koperasi juga menyediakan layanan pinjaman untuk kebutuhan anggota, seperti pendidikan, renovasi rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Proses pinjaman meliputi: pengajuan, evaluasi, pencairan, dan pengembalian. Melalui pengelolaan unit simpan pinjam yang baik, koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan menjaga stabilitas keuangan organisasi. Kegiatan ini juga memberikan pendapatan bagi koperasi yang dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU setiap akhir tahun.

Dasar Pencatatan KPRI "KARUNIA" menggunakan basis akrual (accrual basis) dalam pencatatan akuntansi, yaitu: Pendapatan dan beban diakui saat terjadi transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan dicatat saat jasa atau barang diserahkan. Beban dicatat saat kewajiban timbul, meskipun pembayaran kas bisa menyusul. Untuk mendukung pencatatan ini, koperasi menggunakan: Buku Kas Harian: Mencatat transaksi kas masuk dan keluar secara harian secara rinci. Buku Kas Umum: Mencatat semua transaksi keuangan yang mencakup pendapatan, beban, dan akun lain yang relevan dengan laporan keuangan.

Proses akuntansi di KPRI "KARUNIA" terdiri dari beberapa tahapan: Tahap Pencatatan, Mencatat bukti transaksi ke dalam buku kas harian dan jurnal umum. Contoh transaksi seperti pembayaran honor pengurus, biaya RAT, pajak badan, dll. Tahap Penggolongan, Transaksi dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai nama akun. Buku besar membantu mengetahui posisi saldo masing-masing akun. Tahap Pengikhtisaran Neraca saldo tidak disusun, yang seharusnya dilakukan sesuai SAK EP. Neraca tahunan disajikan, memuat aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pengakuan Pendapatan dan Beban Menggunakan accrual basis, misalnya: Pemberian pinjaman diakui sebagai piutang, bukan langsung sebagai pendapatan. Angsuran anggota dicatat sebagian sebagai pengembalian pokok, sebagian sebagai pendapatan bunga. Beban dibedakan antara beban usaha dan beban koperasi.

Penyajian Laporan Keuangan Disusun sesuai prinsip akuntansi berterima umum: Neraca: Mengelompokkan aktiva lancar, tetap, kewajiban lancar, dan modal. Laporan Laba Rugi: Pendapatan vs beban, SHU.

Laporan Arus Kas: Disusun dengan metode langsung, menunjukkan kas bersih dari aktivitas operasi dan pendanaan. Laporan Perubahan Ekuitas: Menunjukkan perubahan modal koperasi (pokok, wajib, cadangan, SHU) dari tahun ke tahun.

KPRI "KARUNIA" telah menerapkan pencatatan dengan basis akrual dan menyusun laporan keuangan yang umumnya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, meskipun masih terdapat kekurangan seperti tidak disusunnya neraca saldo bulanan. Pencatatan

yang dilakukan sudah sistematis, menggunakan jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan utama.

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan KPRI "KARUNIA" SMPN 1 Plosoklaten, dapat disimpulkan bahwa koperasi telah menerapkan sebagian prinsip Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), namun masih terdapat beberapa kekurangan teknis dan administratif yang perlu diperbaiki.

1. Penerapan SAK EP pada Laporan Keuangan KPRI "KARUNIA" telah mengacu pada prinsip akuntansi seperti going concern, akrual, dan konsistensi. Evaluasi menunjukkan bahwa laporan Posisi Keuangan sudah tersusun cukup baik, tetapi terdapat kesalahan dalam perhitungan aset tetap dan ketidaksesuaian istilah seperti penggunaan "kekayaan" yang seharusnya "ekuitas". Laporan Laba Rugi telah mencatat pendapatan dan beban utama koperasi, namun belum memisahkan jenis beban secara fungsional dan belum mencatat penyusutan inventaris. Laporan Arus Kas disusun secara langsung tetapi belum diklasifikasikan berdasarkan aktivitas (operasi, investasi, dan pendanaan) sesuai standar. Catatan atas Laporan Keuangan telah mencakup komponen penting namun belum lengkap, seperti penjelasan tentang metode penyusutan dan informasi komparatif.
2. Kendala Penerapan SAK EP. Beberapa kendala yang dihadapi KPRI "KARUNIA" dalam penerapan SAK EP antara lain; kurangnya pemahaman pengurus terhadap struktur dan prinsip penyajian laporan keuangan sesuai SAK EP. Pencatatan manual yang rentan kesalahan dan keterlambatan, serta belum adanya klasifikasi arus kas yang tepat. Penggunaan istilah dan format laporan yang belum sesuai standar, serta laporan belum diaudit oleh auditor independen.
3. Upaya Perbaikan Untuk meningkatkan penerapan SAK EP, koperasi perlu: Digitalisasi sistem akuntansi melalui penggunaan software keuangan koperasi. Pelatihan SDM koperasi secara berkala terkait standar akuntansi dan penyusunan laporan. Perbaikan struktur laporan keuangan, seperti klasifikasi beban dan arus kas, serta penggunaan istilah akuntansi yang tepat. Pengawasan eksternal melalui audit independen dan penyusunan SOP akuntansi sebagai acuan pencatatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KPRI "KARUNIA" SMPN 1 Plosoklaten, dapat disimpulkan bahwa koperasi telah menunjukkan upaya penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Hal ini terlihat dari

penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang secara umum sudah sesuai standar. Laporan keuangan koperasi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kepada anggota. Namun, penerapan ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada berbagai aspek teknis yang belum memenuhi standar, seperti pencatatan manual, belum diterapkannya penyusutan aset tetap, serta belum adanya audit independen.

Penerapan SAK EP di KPRI "KARUNIA" masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman pengurus terhadap standar akuntansi, sistem pencatatan keuangan yang masih manual, serta belum adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam pelatihan dan pelibatan auditor eksternal. Meskipun demikian, koperasi telah menunjukkan inisiatif perbaikan dengan mulai menyusun laporan keuangan sesuai prinsip SAK EP, menyediakan laporan yang transparan, serta berencana melakukan digitalisasi sistem keuangan dan peningkatan kapasitas SDM secara bertahap.

Untuk mendukung penerapan penuh SAK EP, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, koperasi perlu mempertahankan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan melalui pelatihan rutin mengenai akuntansi koperasi dan SAK EP. Ketiga, sistem pencatatan keuangan sebaiknya segera didigitalisasi agar lebih efisien dan akurat. Keempat, penyusunan laporan keuangan perlu disesuaikan dengan struktur dan istilah sesuai SAK EP. Selanjutnya, koperasi disarankan melibatkan auditor independen secara berkala untuk meningkatkan keandalan laporan. Terakhir, penting bagi koperasi menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) akuntansi sebagai pedoman tetap untuk pelaporan yang konsisten dan sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasyim, M. A. N., & Tyas, H. N. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Sesuai Dengan Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015: Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra
- Hurairah, I. (2020). *Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan sak etap pada koperasi nelayan perisai mantang kabupaten bintang*.
- IAI. (2020). SAK Entitas Privat. *Iai*, 271.
- Khairiyah, N. M., & Sari, D. H. (2024). *SEIKO: Journal of Management & Business Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) Pada Laporan Keuangan Koperasi CNS*.
- Lusiono, E. F., Raviani, B., & Sentiya, N. (2024). *(Studi Kasus Credit Union Sari Intugin)*.

- Maksima Toyo, Wilhelmina Mitran, & Emilianus Eo Kutu Goo. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Berdasarkan Standar Yang Berlaku Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suro Pudi Koting). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(4), 95–113.
- Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis Penerapan Sak Entitas Privat (Sak Ep) Pada Laporan Keuangan Koperasi Xyz.
- Nabilah, D. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Sak Emkm (Standar Akuntansi Entitas Mikro , Kecil , Dan Menengah) Pada Umkm (Studi Kasus Pada Umkm Galeri Buket Sidoarjo).
- Nastiti, A. S., & Nevia, Y. I. (2023). Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Guna Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Kud Rukun Jaya.
- Putri, V. A., & Saputra, D. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Xyz.
- Sak, P., Dalam, E. P., Laporan, P., Koperasi, K., Mawar, R., & Excel, B. (2024)..
- Salamony, S. M., Titapasanea, D. Y., & Patty, J. P. (2024). *SIMPAN PINJAM (KSP) MUTIARA DI DESA LATERI (Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 2 Tahun 2024)*.
- Saputra, D. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Simpan Pinjam Sorek Maju Bersama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Sekarningrum, A. Y. (2023). *Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Handayani Berdasarkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Handayani Berdasarkan*.
- Slamet, B. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Guru SMA N 1 Rengat*..
- Sri Rahayu Syah, Ika Irmawati, N. (2024). Journal of Accounting, Economics And Business Eeducation. *Journal of Accounting, EconomicsAnd Business Eeducation*,.
- Studi, P., Terapan, S., Manajerial, A., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2024). *Skripsi implementasi standar akuntansi keuangan entitas privat pada laporan keuangan bpr nusamba mengwi*.
- Utami, A. B. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMA Negeri 1 Pasaman*.
- Wijaya, I. (2021). *Regular Accounting Discussion (RAD): STandar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)*.